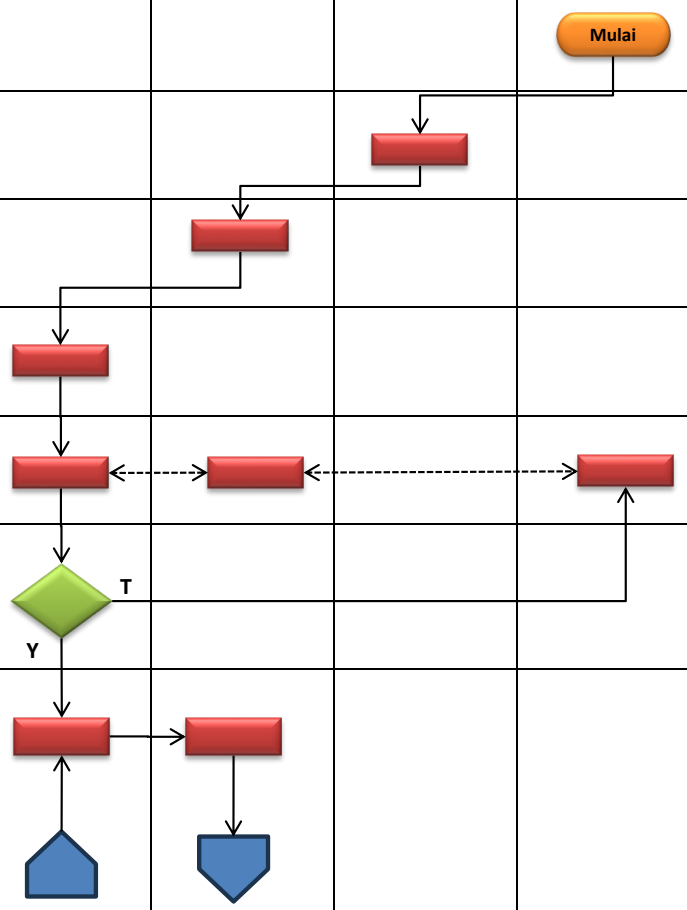
KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN

NOMOR SOP	:	**SEK-OT.02.02-97**
TGL. PEMBUATAN	:	**24 JUNI 2025**
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	**1 OKTOBER 2025**
DISAHKAN OLEH	:	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP	:	**USULAN PERUBAHAN KETENTUAN DAN PERATURAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; 2. Memiliki kemampuan pengoperasian aplikasi SIMPONI; 3. Memiliki kemampuan menganalisa data; 4. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengajuan Usul Ijin Penggunaan Sebagian Dana PNBP	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan Internet 3. Dokumen (Data realisasi PNBP)
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka usulan perubahan ketentuan dan peraturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERUBAHAN KETENTUAN DAN PERATURAN PNBP

No	Aktivitas / Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan TU dan Tim Kerja	Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal	Unit Eselon I	Menteri Hukum	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Unit Eselon I menyampaikan Usulan perubahan ketentuan dan peraturan PNBP kepada Sekretaris Jenderal				Mulai			Dokumen	1 hari	Surat Usulan	
2	Sekretaris Jenderal menugaskan kepada Kepala Biro Keuangan untuk melakukan reviu atas Usulan perubahan ketentuan dan peraturan PNBP							Dokumen	1 hari	Dokumen	
3	Kepala Biro Keuangan menugaskan kepada Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan TU bersama Tim Kerja untuk melakukan reviu atas Usulan perubahan ketentuan dan peraturan PNBP							Dokumen	1 hari	Dokumen	
4	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan TU bersama Tim Kerja melakukan reviu Usulan perubahan ketentuan dan peraturan PNBP							Dokumen	3 hari	Laporan	
5	Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan TU bersama Tim Kerja, dan Unit Eselon I melakukan pembahasan Usulan perubahan ketentuan dan peraturan PNBP							Dokumen	1 hari	Laporan	
6	Hasil dari pembahasan Usulan perubahan ketentuan dan peraturan PNBP disetujui bersama oleh Unit Eselon I dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	T / Y						Dokumen	2 hari	Laporan	
7	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan TU mengajukan konsep surat usulan perubahan ketentuan dan peraturan PNBP kepada Kepala Biro Keuangan untuk mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal							Dokumen	3 hari	Surat Usulan	



No	Aktivitas / Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan TU dan Tim Kerja	Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal	Unit Eselon I	Menteri Hukum	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Sekretaris Jenderal mengajukan konsep surat usulan perubahan ketentuan dan peraturan PNBP untuk mendapat persetujuan dan tanda tangan Menteri Hukum			T Y							
9	Menteri Hukum menandatangani Usulan perubahan ketentuan dan peraturan PNBP					T Y		Dokumen	1 hari	Surat Usulan	
10	Usulan perubahan ketentuan dan peraturan PNBP disampaikan ke Kementerian Keuangan						Selesai	Dokumen	1 hari	Surat Usulan	